

**IMPLEMENTASI KERJA SAMA UNICEF DAN LP MA'ARIF NU JAWA
TENGAH DALAM PROGRAM PENDIDIKAN INKLUSIF DISABILITAS
(2018-2020)**

Oleh : Rania

Pembimbing: Indra Pahlawan S.IP., M.Si

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Inclusive education has been recognized as a solution to overcoming gaps in the percentage of children in formal education, both by sons of disability and non-disability. Indonesia realized that to achieve this challenging goal would need to involve stakeholders. The study tries to explain how UNICEF and ma 'arif nu nu are collaborating to reach SDGS no.4, which is a quality education.

Both sides work together to overcome challenges, such as discrepancies in data collection, negative stigma, the struggle faced by teachers, and family-related poverty. These efforts are analyzed by comparing them with international, national frameworks, planning of inclusive education sectors, CRPD rights conventions, and RAN PD to understand their effectiveness. The writer uses qualitative descriptive research methodology and data collection obtained from interviews, finals of the Indonesian report of UNICEF, and the books, journals, headlines, and data listed on the official related page. In this study, the theory of international cooperation was used by zartman & touval to explain the co-operation of producing something that could not have been generated on its own.

The research found that the cooperation could increase the 5 percent school intervention index between children and disability, so their welfare rate is now at 91 percent of students without disability.

Keywords: *Inclusive Education, UNICEF, LP Ma'arif NU Central Java*

PENDAHULUAN

Penerapan pendidikan inklusif di dunia telah menjadi agenda internasional, salah satunya melalui Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada total 17 Tujuan, Tujuan ke-4 berfokus pada upaya menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua.

Pendidikan inklusif merupakan hak asasi bagi individu dengan disabilitas untuk mendapatkan akses, partisipasi, dan manfaat yang sama dalam sistem pendidikan seperti individu tanpa disabilitas. Konsep ini menekankan pentingnya menyediakan lingkungan belajar yang mendukung bagi semua siswa, tanpa memandang perbedaan atau batasan yang dimiliki.

Dunia internasional setuju bahwa masalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas adalah hal yang penting. Berdasarkan daripada itu, Majelis Umum PBB mengeluarkan Resolusi Nomor 61/06.2006 tentang Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (CRPD). Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi konvensi ini pada 30 Maret 2007 di New York, menegaskan komitmennya terhadap perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dengan mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan tentang pendidikan inklusif dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab IV Pasal 5 ayat 2, 3, dan 4 dan Pasal 32 yang menyebutkan bahwa pendidikan

husus merupakan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan (fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial) atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara inklusif, baik pada tingkat dasar maupun menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Pasal 3 ayat (2) menyatakan bahwa setiap peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mengikuti pendidikan secara inklusif pada satuan pendidikan tertentu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.

Selain Permendiknas tersebut, Indonesia aktif mengikuti berbagai pertemuan internasional yang turut membahas terkait kesetaraan pendidikan, salah satunya pada pertemuan UNESCO bersama UNICEF, World Bank, UNFPA, UNDP, UN Women and UNHCR dalam membahas *World Education Forum* (WEF) di Incheon, Republik Korea, dari tanggal 19-22 Mei 2015. Pertemuan tersebut salah satunya membahas terkait inklusivitas dan kesetaraan pendidikan.

UNICEF mulai berupaya untuk melakukan intervensi terkait Pendidikan inklusif untuk hambatan-hambatan Pendidikan berkualitas bagi para disabilitas. Hal tersebut didukung oleh kerja sama unik bernama Kemitraan 1in11 dengan tema *Inclusive Education for Sustainable*

Development, kerja sama yang dilakukan oleh UNICEF, Pemerintah Indonesia, FC Barcelona Foundation, dan *Reach Out to Asia* (ROTA) periode 2018-2020. Melalui Kemitraan ini, dipilih penanggung jawab pada daerah uji coba terpilih. Penanggung jawab tersebut di antaranya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Helen Keller Indonesia (HKI), LP Ma'arif NU, dan Lembaga Pelatihan dan Konsultan Inovasi Pendidikan Indonesia (LPKIPI).

Berdasarkan narasumber penelitian ini, Program Officer yang mengelola kemitraan UNICEF dan LP Ma'arif NU, yaitu Anissa Elok Budiyan. Beliau mengatakan terdapat beberapa penemuan penting yang dihasilkan oleh kemitraan ini, salah satunya adalah Laporan Formatif Tentang Disabilitas dan Pendidikan Inklusif. Yang mana dalam laporan ini ditemukan bahwa yang menghalangi para disabilitas untuk mengakses Pendidikan yang berkualitas itu dikategorikan dalam 3 hal, di antaranya:

1. Tingginya Stigma: masih adanya miskonsepsi terkait disabilitas dan memahami bahwa disabilitas itu adalah suatu hal yang permanen.
2. Kapasitas Guru Pembimbing Khusus (GPK).
3. Investasi Bantuan pada Pendidikan Inklusif.

Hambatan tersebut membuktikan bahwa belum meratanya penyelenggaraan sistem Pendidikan yang inklusif membuat minimnya jumlah anak dengan disabilitas yang dapat mengakses layanan Pendidikan Inklusif. Data dari Badan Pusat

Statistik (BPS) pada tahun 2017, hanya sebesar 18% dari total jumlah 1,6 juta anak dengan disabilitas yang telah memperoleh layanan Pendidikan Inklusif di Indonesia. (Kasih sumber).¹

Terpilihnya Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah sebagai proyek *partner* karena lembaga ini sudah bekerja sama sebelumnya dengan Pemerintah Australia dalam mengembangkan Pendidikan inklusif dalam proses madrasah dan juga atas saran dari LP Ma'arif NU pusat.

Kemitraan ini sendiri berfokus pada beberapa hal, di antaranya:

1. Berupaya mengubah perilaku atas stigma negatif pada para disabilitas;
2. Melakukan pelatihan terhadap guru mengenai konsep Pendidikan berbasis hak dan advokasi dengan Pemerintah Indonesia terkait pendanaan;

Hal ini terbukti bahwa memberikan manfaat yang besar kepada 67.888 anak, 2.800 guru dan pengelola pendidikan.² Berdasarkan daripada itu, maka dapat disimpulkan bahwa program tersebut berhasil mencapai target populasi yang luas.

Penelitian ini akan berfokus pada studi kasus kerja sama UNICEF

¹ Maulipaksi, Desliana. (2017). *Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi*. Diakses pada 4 Februari 2023 dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah-inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi>.

² United Nations. (2020). *Inclusive Education for Sustainable Development*. Sustainable Development Goals Knowledge Platform. Dalam <https://sdgs.un.org/partnerships/inclusive-education-sustainable-development> diakses pada 1 Februari 2023.

dengan LP Ma'arif NU Jawa Tengah dalam program Pendidikan Inklusif Tahun 2018-2020. Hal itu karena mengingat sumber daya manusia yang siap dan memadai yang ada pada LP Ma'arif NU Jawa Tengah sehingga banyak melahirkan madrasah inklusif berkualitas yang menjadi sekolah percontohan dan bahkan menjadi bahan penelitian internasional.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. Bagi NU, pendidikan menjadi pilar utama yang harus ditegakkan demi mewujudkan masyarakat yang mandiri.³ Gagasan dan gerakan pendidikan ini telah dimulai sejak perintisan pendirian NU di Indonesia.

Secara institusional, LP Ma'arif NU juga mendirikan satuan-satuan pendidikan mulai dari tingkat dasar, menengah hingga perguruan tinggi; sekolah yang bernaung di bawah Departemen Nasional RI. Terhitung sebanyak kurang lebih 100 cabang Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU di berbagai provinsi Indonesia yang terdata dalam Verifikasi Yayasan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Dalam Kemitraan 1in11, LP Ma'arif NU Jawa Tengah meneruskan kerja sama bersama mitra UNICEF dalam rangka mewujudkan inklusivitas di Indonesia. LP Ma'arif NU Jawa

Tengah sendiri memiliki program Madrasah Inklusif yang mendorong dan mengembangkan madrasah untuk menerapkan pendidikan dan layanan inklusif, sehingga anak-anak disabilitas usia sekolah tetap dapat mendapatkan hak-hak mereka untuk belajar di lembaga pendidikan formal baik di madrasah atau sekolah reguler, tidak harus selalu bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB).

Pendidikan inklusif pada madrasah dapat dilaksanakan di unit-unit pendidikan madrasah di RA, MI, MTs, dan MA dengan partisipasi Kementerian Agama dalam implementasi pendidikan inklusif. Penyediaan pendidikan inklusif sudah memiliki payung hukum, yaitu Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 90 tahun 2013 mengenai penerapan Pendidikan Madrasah. Dalam hal ini, madrasah diharuskan untuk dapat menyediakan akses bagi siswa dengan disabilitas.

Pada tahun 2017, Jawa Tengah menjadi provinsi terkemuka di Pulau Jawa dalam hal jumlah siswa disabilitas, dengan total mencapai 6.700 siswa. Data tersebut menunjukkan bahwa Jawa Tengah memainkan peran sentral dalam memberikan layanan pendidikan inklusif bagi siswa disabilitas di wilayah tersebut.

KERANGKA TEORI

Perspektif Pluralisme

Hubungan internasional merupakan suatu hubungan yang dilakukan antar negara dengan aktor negara yang lain. Namun, hal ini berbeda dengan pandangan pluralisme. Pluralisme sendiri adalah sebuah perspektif dalam hubungan internasional yang meyakini akan

³ LP Ma'arif NU. (2022). *Tentang Maarif*. Diakses pada 12 Mei 2024, dari <https://maarif.nu.or.id/page/tentang-maarif>.

adanya heterogenitas aktor di dalam hubungan internasional.

Pluralisme percaya bahwa negara bukanlah satu-satunya aktor, tetapi terdapat pula aktor lain, seperti aktor non negara (NGO dan INGO), MNC, dan kelompok individu lintas batas negara.

Empat asumsi dasar dari pluralisme yang dijelaskan oleh Viotti dan Kauppi dalam membantu menjelaskan pluralisme sebagai sebuah teori adalah:⁴

1. Aktor non-negara memainkan peran penting dalam politik internasional, seperti organisasi internasional (pemerintah dan non-pemerintah), MNC, kelompok atau individu transnasional;
2. Negara tidak lagi menjadi aktor tunggal, karena aktor-aktor lain memainkan peranan yang sama pentingnya dengan negara. Tentu saja hal ini tidak menjadikan lagi negara sebagai aktor tunggal;
3. Negara bukan aktor rasional. Hal ini karena proses perumusan kebijakan luar negeri suatu negara, yang akan menemukan konflik dan kompetisi antar aktor di dalam negara;
4. Masalah-masalah yang muncul tidak lagi terfokus pada *power* atau *national security*, akan tetapi telah meluas pada masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain.

Pluralisme memberikan pandangan yang lebih luas tentang peran berbagai aktor. Hal ini disebabkan oleh fokus bidang yang dimiliki oleh aktor non-negara jauh

lebih spesifik. Selain itu, dengan meyakini akan keberagaman aktor serta interaksi yang terjadi, ilmuwan pluralisme memandang bahwa eksistensi dari aktor aktor non-negara dapat diperhitungkan serta membawa pengaruh yang bermakna dalam sistem internasional.

Teori Kerja Sama Organisasi Internasional

UNICEF berkomitmen untuk memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama dalam mendapatkan akses ke pendidikan dan bagaimana agar setiap anak dapat memperolehnya untuk kehidupan yang lebih sejahtera. Kerangka pemikiran riset ini berakhir pada kerja sama antara UNICEF dengan Indonesia melalui LP Ma'arif NU dalam mensukseskan pendidikan inklusif di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Tengah.

Dalam menjelaskan fenomena ini, digunakan teori kerja sama internasional milik Zartman & Touval yang menyebut kerja sama sebagai situasi di mana para aktor dalam sistem internasional sepakat untuk melakukan kerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dicapai apabila dilakukan sendiri demi kepentingannya. Kerja sama dapat mengacu pada dua hal, yakni strategi aktor dalam menyelesaikan masalah-masalah spesifik dan pola interaksi atau hubungan antar aktor dengan keinginan untuk mempertahankan dan membina interaksi yang ada melalui pemecahan masalah secara bersama. Timbal balik menjadi kunci utama dalam kerja sama, di mana perilaku pengembalian yang sesuai dan

⁴ Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. (1993). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. New York: Macmillan Publishing Company.

menguntungkan di masa depan menjadi jaminannya.⁵

Dalam hal ini, pentingnya kehadiran organisasi internasional dalam menciptakan kondisi kerja sama dan keuntungan kesejahteraan bersama guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah melalui rancangan solusi tertentu dan membujuk orang lain untuk menerimanya. Dalam literturnya, negara teridentifikasi memiliki dua alasan utama dalam mengapa menciptakan organisasi internasional. Pertama, untuk membantu menstabilkan tatanan internasional dan serangkaian pengaturan politik. Kedua, untuk meningkatkan prospek kerja sama, mengatasi masalah yang terkait dengan pilihan kolektif, dan meningkatkan kesejahteraan individu dan kolektif.⁶ Berdasarkan daripada itu, maka organisasi internasional dapat mempermudah hubungan kerja sama lintas negara.

Dalam kata lain, negara membutuhkan kehadiran organisasi internasional untuk menciptakan kondisi kerja sama dan keuntungan kesejahteraan bersama. Oleh Clive Archer, organisasi internasional terbagi ke dalam sembilan fungsi poin, yang salah satunya adalah fungsi operasional atau pelaksanaan. Organisasi internasional yang berfungsi sebagai pelaksanaan dapat dilakukan melalui alokasi bantuan secara nyata yang ditemukan beragam

bentuk, seperti pelayanan bantuan, pelayanan pengungsi, pelayanan teknis, atau yang berkaitan dengan dana dan komoditi.

Level Analisis

Tingkat analisis atau "level of analysis" (LoA) mengacu pada derajat kedalaman analisis yang diterapkan. Pada dasarnya ada tiga level analisis dalam menjelaskan kebijakan aktor negara, di antaranya, yaitu sistem (system-level analysis), negara (*state-level analysis*), dan individu (*individual-level analysis*).⁷

Penelitian ini menggunakan level analisis sistem. Level analisa sistem sendiri adalah salah satu tingkatan yang paling komprehensif dalam studi hubungan internasional. Ini memungkinkan peneliti untuk memahami dinamika dan pola umum dalam sistem internasional yang dapat memengaruhi berbagai aktor, termasuk organisasi internasional seperti UNICEF dan lembaga pendidikan seperti LP Ma'arif NU. Sehingga dalam penelitian ini, dari level analisis sistem ini peneliti ingin melihat bagaimana implementasi kerja sama UNICEF dan LP Ma'arif NU dalam mempengaruhi pendidikan inklusif di Indonesia, khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengumpulkan data dan informasi secara lengkap sesuai dengan waktu yang telah ditentukan mengenai kerja sama UNICEF dengan LP Ma'arif NU pada program

⁵ Zartman, I., & Touval, S. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. New York: Cambridge University Press.

⁶ Weiss, T., & Wilkinson, R. (2014). *International Organization and Global Governance*. London: Routledge.

⁷ Olivia, Yessi. (2013). Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Transnasional Journal*, 5 (1), 898

pendidikan inklusif di Jawa Tengah. Dokumen-dokumen yang relevan dengan implementasi pendidikan inklusif di Indonesia.

Riset ini menggunakan teknik pengumpulan literatur terkait dan wawancara dilakukan dengan narasumber pada UNICEF Indonesia dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah yang dapat dipercaya sebagai sumber utama.

Pelaksanaan Kerja Sama UNICEF – LP Ma'arif NU Jawa Tengah Dalam Program Pendidikan Inklusif Disabilitas

Sejalan dengan teori kerja sama milik Zartman & Touval yang menyebut kerja sama sebagai situasi di mana para aktor dalam sistem internasional sepakat untuk melakukan kerja sama agar dapat menghasilkan sesuatu yang tidak dapat dicapai apabila dilakukan sendiri demi kepentingannya. Penelitian ini mencari jawaban tentang bagaimana UNICEF dan Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU Jawa Tengah telah mendorong pembentukan rencana aksi nasional dan program sejalan dengan SDGs Nomor 4, terutama terkait dengan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Kerja sama ini berawal dari Kemitraan 1in11, yaitu kemitraan yang mencakup UNICEF Indonesia, *Reach Out to Asia*, and *Futbol Club Barcelona Foundation*. Kemitraan 1in11 ini mengangkat tema *Inclusive Education for Sustainable Development* dengan periode kerja sama tahun 2018-2020. Kemitraan tersebut telah berhasil mempromosikan inklusif dan mengubah cara anak-anak dengan disabilitas dilihat dan dihargai dalam masyarakat di Indonesia.

Dengan menggunakan olahraga sebagai alat untuk inklusivitas dan akses pendidikan, intervensi program ini telah memberikan dampak positif bagi anak-anak, baik yang memiliki disabilitas maupun yang tidak. Terutama, skor kesejahteraan anak-anak dengan disabilitas meningkat tanpa mengorbankan kesejahteraan anak-anak tanpa disabilitas.

Dalam mendukung Pendidikan inklusif, di Indonesia sendiri pemerintah telah meratifikasi CRPD melalui UU No. 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of Persons with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan mengesahkan Undang-Undang Penyandang Disabilitas (UU No. 8/2016) yang mengadopsi CRPD. Tujuan CRPD adalah memajukan, melindungi, dan menjamin semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi penyandang disabilitas, serta meningkatkan penghormatan terhadap martabat mereka. CRPD, yang didefinisikan oleh CRPD 2006, menyatakan disabilitas sebagai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang dapat menghambat partisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat.

Terdapat delapan prinsip dalam CRPD sebagai panduan, termasuk penghormatan martabat, non-diskriminasi, partisipasi dalam masyarakat, penghormatan terhadap perbedaan, kesetaraan kesempatan, aksesibilitas, kesetaraan gender, dan penghormatan terhadap kapasitas berkembang dan identitas anak disabilitas. Hal tersebut menjadi penguat mengapa Indonesia ikut

mendukung kerja sama antara UNICEF – LP Ma'arif NU.

Beberapa regulasi lain yang dijadikan basis kerja sama mengarah pada pemberian hak bagi semua anak termasuk anak disabilitas untuk mendapatkan pendidikan secara regular, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa, Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sebagaimana telah diubah dengan PMA Nomor 60 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Kemitraan 1in11 mengangkat judul proyek *Inclusive Education for Sustainable Development* dan dilaksanakan pada April 2018 – Juli 2020. Bekerja sama secara erat dengan Badan Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di provinsi-provinsi berikut:

- a. Jawa Barat
 1. Sukabumi
 2. Bogor

- b. Jawa Tengah
 3. Brebes
 4. Banyumas
 5. Kebumen
 6. Semarang
- c. Jawa Timur
 7. Pasuruan
 8. Bondowoso
- d. Sulawesi Selatan
 9. Bone
 10. Pulau Pangkajene
- e. Sulawesi Barat
 11. Mamuju
 12. Polewali Mandar

Projek ini melibatkan nasional *partner* pada pelaksanaannya, di antaranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud), Helen Keller International, Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif NU, dan LPKIPI.

Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Ma'arif NU) merupakan salah satu aparat departementasi di lingkungan organisasi Nahdlatul Ulama (NU). Didirikannya lembaga ini di NU bertujuan untuk mewujudkan cita-cita pendidikan NU. LP Ma'arif NU sendiri fokus mewujudkan sistem Pendidikan inklusif di sektor madrasah ataupun sekolah regular di bawah naungannya. Pada kemitraan ini, LP Ma'arif NU Pusat memberikan kesempatan kepada LP Ma'arif NU Jawa Tengah untuk melanjutkan kerja sama ini di wilayah mitra Jawa Tengah. Hal itu karena mengingat LP Ma'arif NU Jawa Tengah yang sudah berpengalaman dalam melaksanakan atau menerapkan sistem Pendidikan inklusif.

Urusan pendanaan projek Pendidikan inklusif ini diurus oleh *Reach Out to Asia* dan FC Barcelona

a. Membangun Kerja Sama

Program Pendidikan ini mendukung strategi dan program Pemerintah Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 4 (memastikan pendidikan inklusif dan berkualitas untuk semua dan mempromosikan pembelajaran sepanjang hayat). Pada sisi penyediaan, program ini berfokus pada penerapan model pengembangan olahraga untuk mengatasi kurangnya akses ke sekolah bagi anak-anak di daerah pedesaan terpencil dan anak-anak dengan disabilitas. Hal ini dilakukan dengan menginvestasikan tenaga terlatih, peralatan yang ditingkatkan, aktivitas berbasis olahraga yang diuji, pembangkitan pengetahuan, dan advokasi.

pengujian pendekatan inovatif untuk menyediakan lingkungan pembelajaran yang sesuai. Peta di bawah ini mengilustrasikan distribusi provinsi dan kabupaten sasaran:

Implementasi kerja sama UNICEF dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah untuk Pendidikan inklusif ini dimulai dengan menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun dengan masyarakat di tiap daerah. Sebisa mungkin, kerja sama ini mengundang orang yang sama pada wawancara *baseline*. Wawancara dengan pejabat Pendidikan tingkat kecamatan dan kota/kabupaten juga dilaksanakan. Untuk mendapat gambaran yang lebih lengkap, pengamatan terstruktur juga dilakukan di sekolah dan di kelas. Pengamatan ini berfokus pada proses belajar mengajar di kelas yang memiliki murid penyandang disabilitas.

JOM FISIP Vol. 11: Edisi I Januari - Juni 2024

kabupaten di Jawa Tengah.⁸ Hal tersebut menunjukkan bahwa LP Ma'arif NU Jawa Tengah memiliki peran yang signifikan dalam mengelola dan mempengaruhi jaringan Pendidikan di Jawa Tengah.

Pada Februari 2020, LP Maarif NU telah memimpin upaya untuk mereplikasi modul-program dan pendekatan mereka ke madrasah-madrasah melalui serangkaian *roadshow* di delapan wilayah di Jawa Tengah, melibatkan 2.938 kepala madrasah.⁹ Hal itu menunjukkan bahwa LP Ma'arif NU bertanggung jawab penuh dalam menyukseskan proyek Pendidikan inklusif ini.

Dalam kerja sama UNICEF dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah, dilakukan survei terkait inklusivitas yang menjadi bahan pendukung untuk mewujudkan Pendidikan inklusif di Jawa Tengah.

Sebagai bagian dari strategi replikasi di Jawa Tengah, sebanyak 2.938 kepala madrasah turut serta dalam serangkaian kegiatan peningkatan kapasitas, yang pertama adalah *roadshow* yang dilaksanakan di delapan pusat (satu pusat terhubung dengan tiga hingga tujuh kabupaten). Pada *roadshow* tersebut, para kepala madrasah mempelajari tentang program dan madrasah-modeling. Setiap kepala madrasah menerima salinan keras panduan teknis untuk madrasah inklusif dan salinan lunak modul pelatihan (termasuk metodologi FutbolNet).

Setelah tahapan tersebut, dilakukan pelatihan bagi 22

pembimbing utama yang dipilih dari kabupaten-kabupaten yang melakukan replikasi. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan replikasi program di 3.631 madrasah di 35 kabupaten di Provinsi Jawa Tengah. Para pembimbing akan kemudian melatih fasilitator kabupaten, yang selanjutnya akan bekerja dengan kepala sekolah untuk merencanakan pelatihan guru mereka (menggunakan anggaran kabupaten). Pembimbingan khusus akan diberikan untuk area tertentu, seperti pengembangan rencana pelajaran inklusif dan pelatihan kebutuhan khusus bagi guru pendamping.

Selama pandemi COVID-19, program ini terus melibatkan para pemangku kepentingan pendidikan melalui berbagai sarana *online*. Salah satu contohnya adalah ketika rata-rata 30 guru madrasah berpartisipasi dalam pelatihan mingguan tentang pendidikan inklusif, mendiskusikan metode penilaian dan rencana pembelajaran individual, rencana pembelajaran inklusif, dan pendidikan jasmani inklusif.

Pelaksanaan kerja sama antara UNICEF dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah pada tahun 2018-2020 telah menghasilkan berbagai pencapaian yang signifikan dari setiap mitra pelaksana program. Ini termasuk kontribusi LPPM UNDIP dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak serta gizi, LPPM ITB Semarang dalam menangani anak-anak yang tidak bersekolah (ATS), Yayasan Setara dalam perlindungan anak, dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah dalam memajukan pendidikan inklusif.

LP Ma'arif NU Jawa Tengah melaksanakan program pendidikan inklusif di empat kabupaten, di

⁸ Garcia, Ticiania. (2020). *Final Report UNICEF Indonesia*.

⁹ Ibid.

antaranya Kebumen, Banyumas, Semarang, dan Brebes. Kegiatan yang dilakukan meliputi pelatihan manajemen perubahan untuk madrasah/sekolah inklusif, *workshop* penyusunan kurikulum pendidikan inklusif, kegiatan penjas adaptif dan FutbolNet, kampanye pendidikan inklusif bersama 12 lembaga komunitas di 4 kabupaten target, inisiatif pendidikan inklusi di perguruan tinggi (IAINU Kebumen, UNU Purwokerto, UIN Walisongo).

Selain itu, dilakukan penyusunan modul pendidikan inklusif, *workshop* SIPBM di 3 kabupaten (Kebumen, Banyumas, Semarang), Festival Pendidikan Inklusif, kegiatan pemantauan bersama pemangku kebijakan, penguatan peran Guru Pendamping Khusus (GPK), pelatihan TOT untuk fasilitator pendidikan inklusif tingkat provinsi, peningkatan kapasitas fasilitator inklusi di tingkat kabupaten, pendampingan (mentoring) untuk madrasah inklusif, kampanye pendidikan inklusi di 8 lokasi di Jawa Tengah, dan digitalisasi modul pendidikan inklusif.

Meskipun beberapa keterlambatan implementasi karena wabah COVID-19 pada tahun 2020, program ini telah memberikan manfaat bagi hampir 402.000 anak (48 persen perempuan, 3 persen dengan disabilitas) di lokasi uji coba di seluruh Indonesia.¹⁰

b. Sekolah Percontohan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif telah diakui sebagai sistem Pendidikan baru

untuk Madrasah, yaitu sekolah khusus yang mengajarkan agama Islam sebagai tambahan dari pelajaran reguler.¹¹ Madrasah Ibtidaiyah (MI) Keji, Semarang, Jawa Tengah telah diakui sebagai sekolah inklusif dan bekerja sama dengan berbagai pihak termasuk UNICEF, pemerintah Indonesia, serta dengan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama (LP Maarif NU) karena keterkaitannya dengan studi Islam dan pengaruhnya.

Program tersebut berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta Kementerian Agama (Kemenag) karena tujuannya untuk mengajarkan nilai-nilai Islam.¹² Program kerja sama pendidikan inklusif ini mendapat dukungan yang kuat dari FC Barcelona Foundation dan *Reach Out to Asia* (ROTA), dua lembaga yang telah lama berkomitmen untuk memperluas akses pendidikan berkualitas bagi anak-anak di seluruh dunia.

Pada kerja sama antara UNICEF dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah ditemukan alasan-alasan mengapa orang tua tidak menyekolahkan anak penyandang disabilitas.

¹⁰ Garcia, Ticiania. (2020). *Final Report UNICEF Indonesia*.

¹¹ Syari'i, A., Akrim, A., & Hamdanah. (2020). The Development of Madrasa Education in Indonesia. *Revista Argentina De Clínica Psicológica*, 29, 513-523.

¹² Wibowo, A. M., & Prihatin, T. (2020). The Diffusion Innovation of Madrasa Ibtidaiya Inclusion from Regular School to Inclusive. *In Proceedings of the International Conference on Science and Education and Technology*.

Tabel 1. Alasan Tidak Menyekolahkan Anak Penyandang Disabilitas

<i>Baseline</i>		
Alasan	Brebes	Banyumas
Kondisi fisik anak terlalu lemah	24%	32%
Takut dirundung	8%	24%
Anak tidak bisa mandiri	16%	4%
Anak terlalu hiperaktif dan sulit ditangani	32%	4%
Tidak ada transportasi	0	4%
Tidak dapat membayar biaya sekolah	20%	32%

<i>Endline</i>		
Alasan	Brebes	Banyumas
Kondisi fisik anak terlalu lemah	23%	55%
Takut dirundung	3%	13%
Anak tidak bisa mandiri	10%	3%
Anak terlalu hiperaktif dan sulit ditangani	0	0
Tidak ada transportasi	10%	10%
Tidak dapat membayar biaya sekolah	54%	19%

Sumber: Dokumen UNICEF 2020

Orang tua dari anak-anak yang bersekolah, baik penyandang disabilitas dan tanpa disabilitas, dalam

kerja sama ini ditanyai pendapatnya tentang sekolah anak-anak mereka. Secara keseluruhan, orang tua dari anak-anak penyandang disabilitas yang menghadiri sekolah inklusif merasa bahwa lingkungan sekolah anak mereka menjadi lebih baik. Sementara itu, orang tua dari anak-anak tanpa disabilitas tidak melihat dampak negatif pada anak-anak mereka yang bersekolah di sekolah inklusif. Sebaliknya, orang tua dari anak-anak penyandang disabilitas yang putus sekolah masih merasa bahwa lingkungan sekolah tidak mendukung anak-anak mereka.

Salah satu madrasah di bawah naungan LP Ma'arif NU Jawa Tengah, yaitu Madrasah Ibtida'iyah Keji dipilih sebagai sekolah inklusif pertama oleh Pemerintah Indonesia dan menjadi target dalam program kemitraan 1in11. Dahulunya, masyarakat memandang sekolah ini sebagai pilihan transfer bagi anak-anak yang dianggap memiliki kebutuhan khusus, sekolah ini disebut sebagai "sekolah sampah". Sebuah ruang diskusi diadakan sehingga akhirnya setuju untuk melaksanakan pendidikan yang inklusif.

Anggota sekolah sendiri tetap menghadapi kesulitan dalam mengajar Pendidikan Jasmani (PJ) kepada anak-anak disabilitas meskipun telah didukung oleh beberapa pihak. Pada hal ini, peran ROTA dan FC Barcelona Foundation telah sangat dominan dengan membentuk program yang disebut Futbolnet.

Fasilitas bagi para disabilitas, sumber daya manusia yang akan mereka butuhkan, pelatihan yang inklusif, dan bahkan sekolah yang inklusif itu sendiri diperiksa dalam

langkah-langkah berikutnya. Pada kerja sama ini, tim UNICEF kemudian menyediakan pelatihan pendidikan yang inklusif kepada para siswa di Keji dan beberapa madrasah yang inklusif di Jawa Tengah.¹³

Atika merupakan salah satu dari 25 peserta didik penyandang disabilitas yang menerima manfaat dari layanan pendidikan inklusif di MI Keji. Pada tahun 2017, madrasah ini diangkat sebagai sekolah percontohan di Jawa Tengah untuk pendidikan inklusif dalam kerangka kemitraan 1in11 antara Pemerintah Indonesia, UNICEF, dan LP Maarif NU, dengan dukungan dari ROTA dan FC Barcelona Foundation.¹⁴

Sebanyak 17 dari 18 guru di MI Keji telah mengikuti pelatihan modul pengembangan madrasah inklusif yang diselenggarakan oleh LP Maarif NU, yang meliputi adaptasi FutbolNet, modul olahraga inklusif yang dikembangkan oleh FC Barcelona Foundation. Program ini memberikan kesempatan bagi para guru untuk mengikuti pelatihan dan lokakarya terkait pendidikan inklusif.

Implementasi program pendidikan inklusif di MI Keji telah menciptakan perubahan signifikan dalam interaksi Atika dan kawan-kawannya di lingkungan sekolah. Azis, ayah Atika, mengungkapkan rasa terima kasihnya atas perubahan tersebut, menyoroti sikap ramah dan

dukungan yang ditunjukkan oleh guru dan siswa terhadap putrinya.

Sebagai contoh, Azis (Ayah Atika) menceritakan pengalaman Atika saat istirahat sekolah ketika ia ingin buang air kecil. Beberapa temannya langsung memberi tahu guru atau orang dewasa lain yang bisa membantu. Ada yang menuntun Atika ke toilet dan membantunya membersihkan diri, sementara yang lain mengambil pakaian bersih dari tas sekolah untuk diganti.

Gambar 2. Interaksi Atika dengan Orang Sekitar



Sumber: UNICEF Indonesia 2020

Ketika pandemi melanda, para GPK dihadapkan pada tantangan baru di mana mereka diminta untuk tetap memberikan petunjuk dan pelajaran yang relevan serta bermanfaat melalui platform pembelajaran *online*. Dalam menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini, GPK perlu mengembangkan strategi kreatif dan inovatif untuk menyesuaikan metode pembelajaran mereka dengan lingkungan virtual, memastikan bahwa anak-anak dengan disabilitas tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan untuk meraih kesuksesan akademik dan perkembangan pribadi mereka.

Nilai-nilai seperti rendah hati, usaha, ambisi, rasa hormat, kerja sama,

¹³ Ibid.

¹⁴ UNICEF. (2020). Memberikan kesempatan pendidikan yang setara untuk setiap anak [Judul artikel]. Diakses pada 13 Mei 2024 dari <https://www.unicef.org/indonesia/id/pendidikan-dan-remaja/coronavirus/cerita/memberikan-kesempatan-pendidikan-yang-setara-untuk-setiap-anak>.

moderat (tawasut), (seimbang) tawazun, adil (i'tidal), dan toleransi (tasamuh). Semuanya diajarkan melalui kegiatan fisik. Pada sisi lain, latihan fisik harus dimodifikasi untuk sesuai dengan kebutuhan unik setiap anak yang memiliki disabilitas. Bola yang lebih kecil dan ringan cocok untuk anak-anak yang menggunakan kursi roda atau memiliki mobilitas terbatas. Bahasa isyarat dan contoh visual menjadi krusial bagi anak-anak tuli. Terakhir, para pendidik diminta untuk lebih memahami siswa dengan disabilitas intelektual dengan memberikan penjelasan yang singkat dan mudah dimengerti serta memberikan waktu tambahan pada saat berkegiatan.

c. Festival Olahraga Pendidikan Inklusif Jawa Tengah

Pada Festival Pendidikan Inklusif di Banyumas, yang diadakan pada tanggal 27–28 Agustus 2019, LP Ma'arif NU Jawa Tengah bekerja sama dengan UNICEF dan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas untuk menyelenggarakan "Gebyar Pendidikan Inklusif", yang dalam acara itu menampilkan olahraga *Ma'arif Sport* dan *Ma'arif Play*.

Modul ini terbukti efektif khususnya dalam mengenali anak-anak yang memiliki gangguan dalam melihat, mendengar, berjalan, dan berbicara. Meski diuji di Fiji, modul ini masih terbukti "adil" dalam mengidentifikasi anak-anak penyandang disabilitas. Anak yang memiliki "kesulitan" dalam belajar tidak dapat secara langsung dianggap sebagai anak yang cacat. Tim riset *Nossal Institute for Global Health*, University of Melbourne, menyatakan bahwa anak-anak tersebut tidak boleh

diabaikan.¹⁵ Berdasarkan daripada itu, maka, data pendukung lainnya dari negara ini juga diperlukan.

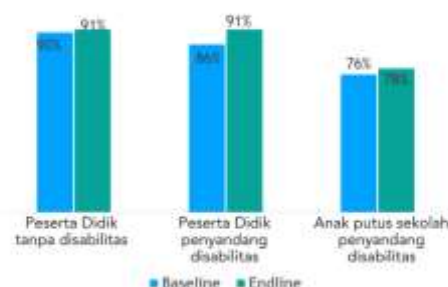
d. Indeks Kesejahteraan Anak Penyandang Disabilitas di Sekolah Intervensi

Indeks kesejahteraan anak meningkat sebanyak 5 persen di antara anak-anak penyandang disabilitas di sekolah intervensi. Tingkat kesejahteraan mereka kini setara dengan murid tanpa disabilitas sebesar 91 persen. Meskipun peningkatan teramati di seluruh dimensi yang diukur, kondisi sekolah, pertemanan, kepemilikan barang, dan kehidupan secara umum teramati paling banyak meningkat.

Temuan tersebut mengindikasikan bahwa intervensi di sekolah telah membuat anak-anak penyandang disabilitas merasa lebih nyaman di sekolah, mampu menjalin hubungan pertemanan yang lebih baik, dan lebih bahagia dengan hidupnya secara umum.

Gambar 3. Perubahan Indeks Kesejahteraan Anak

Perubahan indeks kesejahteraan anak di sekolah intervensi dan di luar sekolah



Sumber: Dokumen UNICEF 2020

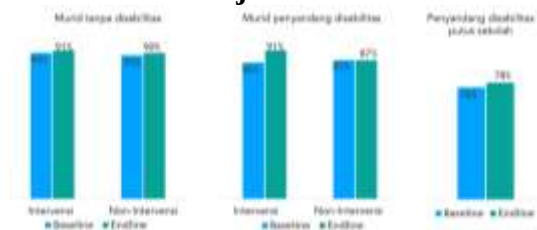
Indeks kesejahteraan *baseline* dan *endline* untuk murid tanpa disabilitas, murid penyandang disabilitas, dan anak penyandang

¹⁵ Ibid.

disabilitas yang putus sekolah dijabarkan di Gambar 2. Pada anak penyandang disabilitas, indeks kesejahteraan meningkat dari 86 persen menjadi 91 persen di sekolah intervensi, tetapi tetap pada 87 persen di sekolah non-intervensi. Sedangkan pada murid tanpa disabilitas, terdapat sedikit peningkatan di sekolah intervensi dan non-intervensi, dari 90 persen menjadi 91 persen untuk sekolah intervensi; dan dari 89 persen menjadi 91 persen untuk sekolah non-intervensi. Terakhir, untuk anak penyandang disabilitas yang putus sekolah terdapat sedikit peningkatan, dari 76 persen menjadi 78 persen.

Peningkatan indeks kesejahteraan menunjukkan bahwa terdapat dampak positif dari program intervensi bagi anak-anak penyandang disabilitas yang berada di sekolah intervensi, sementara dampak yang sama tidak begitu terlihat di antara anak-anak tanpa disabilitas di sekolah yang sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa kegiatan intervensi di tingkat sekolah telah meningkatkan kesejahteraan anak-anak penyandang disabilitas, tanpa mengurangi kesejahteraan anak-anak tanpa disabilitas. Selain itu, hasil di sekolah non-intervensi yang tidak mengalami peningkatan indeks kesejahteraan anak menguatkan temuan bahwa peningkatan indeks kesejahteraan murid penyandang disabilitas berkorelasi dengan intervensi sekolah.

Gambar 4. Perubahan Dalam Indeks Kesejahteraan Anak



Sumber: Dokumen UNICEF 2020

Analisis terhadap setiap dimensi indeks kesejahteraan mengungkapkan bahwa perubahan signifikan terjadi di antara murid penyandang disabilitas di semua dimensi. Hal tersebut mencakup dimensi pertemanan, kondisi sekolah, serta kehidupan secara umum (seberapa bahagia mereka terhadap hidup mereka, apakah mereka menikmati hidup mereka dan apakah semuanya baik-baik saja) meningkat 5 persen dari studi baseline. Para murid lebih bahagia di sekolah dan bersama teman-teman yang membuat mereka merasa hidup lebih bahagia. Ini semakin menguatkan temuan bahwa intervensi di tingkat sekolah dapat meningkatkan kesejahteraan murid penyandang disabilitas di sekolah.

e. Mengadopsi Modul Alat Pembelajaran

Lembaga Pendidikan (LP) Ma'arif Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Tengah bekerja sama dengan UNICEF Indonesia dalam mengadakan sosialisasi tentang Sistem Informasi Pembangunan Berbasis Masyarakat di dua kabupaten inklusif di Jawa Tengah, yaitu Banyumas dan Kebumen. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menerapkan sistem pendataan berbasis masyarakat melalui metode sensus serta untuk memberikan informasi tentang pengalaman yang

telah dialami Kabupaten Brebes dengan menggunakan data SIPBM untuk intervensi program, salah satunya adalah Gerakan Kembali Bersekolah.

Kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan data secara akurat dan komprehensif tentang populasi siswa yang tidak bersekolah, tetapi juga untuk mengintegrasikan informasi tersebut ke dalam kebijakan dan program-program intervensi yang bertujuan untuk meningkatkan akses dan partisipasi pendidikan.

Gambar 5. Sosialisasi SIPBM di Kabupaten Kebumen (18/09/2019)



Sumber: <https://sipbm.brebeskab.go.id>
2019

Gambar 6. Sosialisasi SIPBM di Kabupaten Banyumas (17/09/2019)



Sumber: <https://sipbm.brebeskab.go.id>
2019

Berdasarkan pernyataan Wakil Ketua LP Ma'arif PWNU Jateng, Fakhruddin Karmani pada sosialisasi tersebut. Dua kabupaten ini termasuk dalam Kabupaten Intervensi UNICEF

untuk inklusif.¹⁶ Pada hal inklusif di kabupaten ini, LP Ma'arif Jawa Tengah berkomitmen untuk memperkuat komitmen daerah dalam hal anggaran, regulasi, dan rencana aksi, salah satunya adalah memperkenalkan SIPBM sebagai basis data yang akurat di tingkat desa.

f. Program yang Tercapai Dalam Kerja Sama UNICEF dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah Untuk Pendidikan Inklusif

- a) Dampak positif ditemukan di antara anak-anak baik dengan maupun tanpa disabilitas di sekolah-sekolah intervensi. Indeks kesejahteraan anak-anak meningkat sebesar 5 persen di antara anak-anak dengan disabilitas, sehingga tingkat kesejahteraan mereka sekarang mencapai 91 persen dari siswa tanpa disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi di sekolah telah membuat anak-anak dengan disabilitas merasa lebih baik tentang berada di sekolah, meningkatkan hubungan mereka dengan teman-teman, dan meningkatkan kebahagiaan mereka dengan kehidupan mereka secara umum.
- b) Perubahan positif juga terlihat dalam pengetahuan, sikap, dan praktik orang tua serta komunitas pendidikan. Meskipun stigma dan mitos tentang disabilitas belum sepenuhnya hilang, lebih

¹⁶ SIPBM Digital Kab. Brebes. (2019). Sistem Informasi Pengaduan Bersama. Diakses dari <https://sipbm.brebeskab.go.id> tanggal 21 Maret 2024.

sedikit orang tua yang sekarang mengungkapkannya. Studi akhir menemukan bahwa orang tua lebih sering menggunakan istilah seperti 'disabilitas' daripada istilah merendahkan seperti 'cacat'.

Mereka tidak lagi menganggap bahwa anak-anak dengan disabilitas selalu bergantung pada orang tua mereka atau bahwa akan sulit bagi mereka untuk berteman dengan anak-anak di sekolah baik yang memiliki disabilitas maupun tidak.

- c) Rata-rata tingkat pengetahuan dan sikap positif serta praktik baik (skor KAP) dari guru dan kepala sekolah di sekolah intervensi meningkat secara signifikan setelah intervensi (4,4 persen untuk guru dan 5,5 persen untuk kepala sekolah). Peningkatan skor KAP untuk guru sebagian besar berasal dari peningkatan pengetahuan, sementara kepala sekolah mengalami peningkatan baik dalam pengetahuan maupun sikap. Lebih banyak guru memahami bahwa ada manfaat dari memasang anak-anak dengan dan tanpa disabilitas untuk belajar bersama di dalam kelas dan bahwa mereka dapat mengembangkan rencana pembelajaran individual yang disesuaikan untuk setiap siswa. Selain itu, lebih banyak guru sekarang menggunakan praktik disiplin positif daripada hukuman fisik.

- d) Sebanyak 51.543 pemangku kepentingan (orang tua, pejabat

pemerintah, komunitas sekolah) telah menerima pesan-pesan pendidikan inklusif melalui materi informasi, pendidikan, dan komunikasi (IEC), disampaikan melalui berbagai saluran. Proses ini telah dipandu oleh strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak penyandang disabilitas dengan memberdayakan partisipasi mereka sehingga mereka dapat sendiri menjadi advokat untuk perubahan dan kebijakan yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka, akses terhadap layanan, dan kondisi hidup (prinsip "Tentang kami tanpa kami").

SIMPULAN

Pemerintah Indonesia dan UNICEF telah mengakui perlunya memberikan pendidikan berkualitas tinggi bagi anak-anak disabilitas, dan mereka bekerja sama untuk mencapai tujuan ini. Persekutuan Bangsa-Bangsa (PBB) meningkatkan kesadaran akan nilai pendidikan inklusif secara global untuk meningkatkan standar instruksi, baik bagi anak-anak dengan maupun tanpa disabilitas. Walaupun demikian, sampai saat ini masih jelas terdapat kesenjangan dalam proporsi anak-anak penyandang disabilitas dan non-disabilitas yang memperoleh pendidikan formal.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan penelitian berikut: "Dalam menghadapi kesenjangan dalam persentase anak-anak dengan dan tanpa disabilitas, bagaimana UNICEF dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah

bekerja sama untuk mempromosikan pendidikan inklusif bagi anak-anak disabilitas?"

Menurut penelitian ini, UNICEF bekerja sama dengan LP Ma'arif NU Jawa Tengah untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Nomor 4, yang sangat penting bagi anak-anak dengan disabilitas. Berdasarkan daripada itu, maka tujuan pendidikan inklusif adalah menyediakan sistem yang memungkinkan anak-anak dengan disabilitas dan yang tidak memiliki disabilitas untuk berinteraksi dalam peraturan yang sama.

Analisis kerja sama UNICEF dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah adalah tujuan utama dari studi ini. Baik UNICEF maupun LP Ma'arif NU Jawa Tengah sedang melakukan beberapa upaya untuk mengatasi ketidakseimbangan persentase dan masalah terkait penerapan inklusivitas.

Terdapat beberapa kekurangan dalam memberikan pendidikan inklusif sebelum adanya kerja sama ini. Pertama, adanya pengumpulan data yang tidak konsisten mengenai jumlah anak-anak dengan disabilitas oleh berbagai lembaga. Kedua, para disabilitas terjebak dalam kemiskinan struktural sepanjang hidup mereka. Ketiga, karena individu para disabilitas merasa tidak aman tentang kemampuannya untuk berkembang secara pribadi, stigma sosial dan kurangnya pengetahuan tentang disabilitas memperpanjang siklus kemiskinan. Keempat adalah tentang kesulitan para guru dalam menyesuaikan kurikulum pendidikan inklusif.

Inisiatif pendidikan inklusif di Madrasah Ibtidaiyah Keji dapat memotivasi dan diperluas ke wilayah lain di Indonesia melalui pemerintah Indonesia. Lebih dari 30.000 sekolah inklusif telah didirikan di Indonesia, namun beberapa masalah masih menjadi tantangan dalam penerapannya. Indonesia dapat melanjutkan proyek percobaan ini sendiri dengan bekerja sama dengan mitra lain, termasuk aktor lokal sebagai hasil dari kerja sama sukses antara UNICEF dan LP Ma'arif NU Jawa Tengah.

Anak disabilitas yang akan semakin tertarik untuk masuk ke sekolah inklusif untuk menyelesaikan pendidikan formal mereka jika pendidikan inklusif ini berhasil. Berdasarkan daripada itu, maka persentase yang tidak seimbang mungkin akan cepat menjadi lebih seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Garcia, Ticiana. (2020). *Final Report* UNICEF Indonesia.

LP Ma'arif NU Jateng. (2020). LP Ma'arif NU Jateng Gandeng UNICEF Gelar TOT Pendidikan Inklusif. <https://maarifnujateng.or.id/2017/06/lp-maarif-nu-jateng-bermitra-dengan-unicef-gelar-tot-pendidikan-inklusif/>. Diakses pada 13 Oktober 2023.

Maulipaksi, Desliana. (2017). *Sekolah Inklusi dan Pembangunan SLB Dukung Pendidikan Inklusi*. Diakses pada 4 Februari 2003 dari <https://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/02/sekolah->

inklusi-dan-pembangunan-slb-dukung-pendidikan-inklusi.

- Olivia, Yessi. (2013). Level Analisis Sistem dan Teori Hubungan Internasional. *Transnasional Journal*, 5 (1), 898.
- Paul R. Viotti and Mark V. Kauppi. (1993). *International Relations Theory: Realism, Pluralism, Globalism*. New York: Macmillan Publishing Company.
- SIPBM Digital Kab. Brebes. (2019). Sistem Informasi Pengaduan Bersama. Diakses dari <https://sipbm.brebeskab.go.id> tanggal 21 Maret 2024.
- Syari'i, A., Akrim, A., & Hamdanah. (2020). *The Development of Madrasa Education in Indonesia*. *Revista Argentina De Clínica Psicológica*, 29, 513-523.
- United Nations. (2016). *Convention on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD) Enable*. <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>. Diakses dari tanggal 01 Maret 2024.
- United Nations. (2020). *Inclusive Education for Sustainable Development*. *Sustainable Development Goals Knowledge Platform*. Dalam <https://sdgs.un.org/partnerships/inclusive-education-sustainable-development> diakses pada 1 Februari 2023.
- UNICEF. (2021). *FC Barcelona and UNICEF launch new research to improve sport for development delivery for children*. Diakses pada tanggal 22 Mei 2023. <https://www.unicef.org/partnerships/fc-barcelona-and-unicef-launch-new-research-on-sport-for-development>.
- Wibowo, A. M., & Prihatin, T. (2020). *The Diffusion Innovation of Madrasa Ibtidaiya Inclusion from Regular School to Inclusive*. In *Proceedings of the International Conference on Science and Education and Technology*.
- Zartman, I., & Touval, S. (2010). *International Cooperation: The Extents and Limits of Multilateralism*. New York: Cambridge University Press.